



Pengendalian Kejahatan Korupsi dan Sustainable Development Goals di Indonesia

Rizky Bintang Setiawan^{1*}, Mar'atus Sholikhah², Rahmatika Azizi³

^{1,2} Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

³ Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Indonesia

Abstrak: Pilar SDGs 16 adalah Menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Dapat diartikan bahwa pemberantasan korupsi adalah kunci keberhasilan SDGs lainnya. Hal ini berlaku bagi negara-negara yang korupsinya masih tinggi, termasuk Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk melihat seberapa besar pengaruh antara pengendalian korupsi dan pembangunan berkelanjutan serta kekuatan hubungan antar kedua variabel tersebut agar dapat menjadi rujukan para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Studi ini menggunakan data sekunder Worldwide Governance Indicators periode 2002-2021 yang diperoleh dari website World Bank. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk memenuhi tujuan penelitian ini, dilakukan analisis regresi Linear sederhana dengan menggunakan aplikasi Software statistik STATA17. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel pengendalian kejahatan korupsi berpengaruh terhadap SDGs di Indonesia dan terdapat korelasi positif yang kuat antar variabel tersebut.

Kata kunci: Kejahatan Korupsi, SDGs, Pembangunan

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v6i1.2176>

*Correspondence: Rizky Bintang Setiawan

Email:

Rizkybintang.2019@student.uny.ac.id

Received: 10-11-2024

Accepted: 22-12-2024

Published: 09-01-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The pillars of SDGs 16 are Creating peaceful and inclusive societies for sustainable development, providing access to justice for all, and building effective, accountable, and inclusive institutions at all levels. Eradicating corruption is the key to the success of the other SDGs. This applies to countries where corruption is still high, including Indonesia. The purpose of this study is to see how much influence there is between corruption control and sustainable development and the strength of the relationship between the two variables so that it can become a reference for stakeholders in making decisions to achieve sustainable development goals in 2030. This study uses secondary data from the Worldwide Governance Indicators for 2002-2021 from the World Bank website. This type of research uses a quantitative approach. The study using objectives of this study, a simple linear regression analysis, was performed using the STATA17 statistical software application. The study's results found that the corruption crime control variable affected the SDGs in Indonesia and a strong positive correlation existed between these variables.

Keywords: Corruption Crime, SDGs, Development

Pendahuluan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 berisiko gagal jika korupsi masih terus merajalela (Ahmed & Anifowose, 2024). Pembiayaan pembangunan hanya berhasil jika korupsi dapat dicegah dan dikurangi. Oleh karena itu, masalah korupsi harus menjadi perhatian para pemimpin dunia. Sunday (2017) mengatakan dalam praktik korupsi, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak pemberi suap dan pihak penerima suap, pihak pemberi suap biasanya adalah individu atau kelompok yang ingin mendapatkan keuntungan tertentu, sedangkan pihak penerima suap adalah pejabat publik yang memiliki wewenang untuk memberikan atau menolak permintaan tersebut. Realitas di Indonesia saat ini adalah bahwa meskipun banyak biaya dihabiskan untuk pembangunan setiap tahun, namun belum memiliki banyak perubahan. Korupsi akibat tata kelola yang buruk menjadi penyebabnya. Akibatnya, pengadaan barang dan jasa untuk penyediaan dan pengembangan pelayanan publik tidak sampai kepada pihak yang paling membutuhkan (Mugellini dan Villeneuve, 2019).

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, yang diterbitkan oleh Transparency International pada tahun 2020, menempatkan Indonesia pada peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi dalam birokrasi, lembaga politik dan peradilan. Tujuan 16 dari SDGs menyoroti, antara lain, pentingnya tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi. Masyarakat perlu dilibatkan saat kebijakan dirumuskan hingga program pembangunan dilaksanakan. SDGs menempatkan masyarakat sebagai pusat. Ini berarti bahwa masyarakat adalah tujuan akhir dalam pembangunan. Kelompok rentan yang selama ini terabaikan dalam agenda pembangunan harus diprioritaskan sebelum hal penting lainnya dibahas. Tujuan dari 16 SDGs, pembangunan masyarakat yang damai, adil dan inklusif, dapat dicapai melalui praktik pemerintahan terbuka.

Menurut Peacock (2021), aspek hukum dan keamanan kurang dibahas dalam kontribusi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya Tujuan ke-16 Menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Dapat diartikan bahwa pemberantasan korupsi adalah kunci keberhasilan SDGs lainnya, korupsi ini disebutkan sebagai penyakit yang menggegeroti sendi-sendi pembangunan sehingga memperlambat kemajuan suatu bangsa dalam mencapai tujuannya seperti cakupan Kesehatan untuk semua dalam segala aspek (UHC) (Asssembly, 2015). Hal ini berlaku bagi negara-negara yang korupsinya masih tinggi, termasuk Indonesia. Transparency International (2017) menemukan bahwa lebih dari satu dari empat orang di suatu wilayah, atau lebih dari 900 juta orang, membayar suap pada tahun lalu untuk mendapatkan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Akibatnya, kemajuan menuju SDGs 3 untuk kesehatan yang lebih baik dan SDGs untuk pendidikan yang lebih baik menjadi lebih sulit (Fan et al, 2023). Upaya Pendidikan, keluarga berencana dan pengendalian populasi di Indonesia belum terlalu berhasil, dan sulit untuk mengatakan seberapa berkelanjutan pertumbuhan negara Indonesia (World Population Review, 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan

ancaman serius terhadap 17 tujuan dan 169 sub-tujuan SDGs (Mugellini & Villeneuve, 2019). Oleh karena itu, memerangi korupsi adalah salah satu prioritas utama SDGs. Secara umum, SDGs 16 memiliki tujuan yang terkait dengan agenda antikorupsi. Memerangi Korupsi dan Penyusutan serta Menciptakan institusi yang transparan dan akuntabel (Fleming et al, 2017). Upaya bersama dan sinergi dari semua pemangku kepentingan diperlukan untuk memerangi korupsi dan menghasilkan respons yang transparan, efektif, dan adil dalam jangka panjang. Sebagai anggota pendiri OGP, Indonesia akan terus menjunjung tinggi semangat good governance di tingkat global (Bappenas, 2021).

Setiap tujuan dirumuskan dalam bentuk satu atau dua indikator untuk mengukur kemajuannya. Untuk memastikan keberhasilan SDGs, fokusnya harus pada Tujuan yang menangani korupsi dan penyusutan (Waluyo, 2014). Namun, karena hanya mencakup suap, ukuran keberhasilannya terlalu sempit. Padahal banyak cara lain selain suap (Lasthuizen, Huberts and Heres, 2011). Apalagi mengukur keberhasilan sangat tergantung pada pengalaman orang yang melakukan suap. Suap cenderung hanya mempengaruhi sebagian kecil populasi (Philp, 2016).

Permasalahan saat ini, undang-undang dan peraturan di Indonesia tidak mengurangi korupsi secara signifikan. Implementasi aturan di Indonesia tidak efektif. Penyebabnya adalah penegakan peraturan yang tidak konsisten dan kurangnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan tersebut. Sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk melihat seberapa besar pengaruh antara pengendalian korupsi dan pembangunan berkelanjutan serta kekuatan hubungan anatar kedua variabel tersebut agar dapat menjadi rujukan para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.

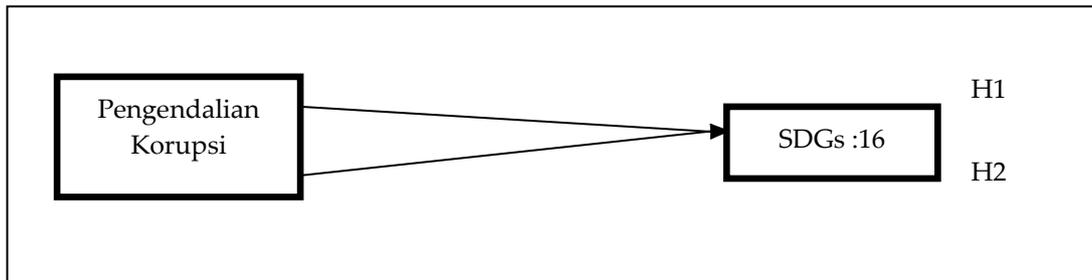
Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Kekuatan hubungan pengendalian kejahatan korupsi terhadap SDGs di Indonesia

H2: Pengaruh pengendalian kejahatan korupsi terhadap SDGs di Indonesia

Metode

Studi ini menggunakan data sekunder Worldwide Governance Indicators periode 2002-2021 yang diperoleh dari website World Bank. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk memenuhi tujuan penelitian ini, dilakukan analisis regresi Linear sederhana dan ANOVA dengan data cross-section menggunakan aplikasi Software statistik STATA17. Seluruh tahapan penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis data, telah dilakukan dengan cermat untuk memastikan hasil yang diperoleh memiliki tingkat akurasi dan reliabilitas yang tinggi. Berikut ini merupakan desain penelitian yang digunakan:



Gambar 1. Desain Penelitian

Sumber: Peneliti (2023)

Tabel 1. Variabel dan Sumber Data

Nama Variabel	Tipe Variabel	Deskripsi
Control of Corruption (CC)	Variabel Independen	Pengendalian Korupsi mengukur persepsi tentang sejauh mana kekuasaan publik dilaksanakan untuk keuntungan pribadi, termasuk korupsi kecil dan besar, serta "perebutan" negara oleh elit dan kepentingan pribadi. Estimasi memberikan skor negara pada indikator agregat, dalam satuan distribusi normal standar, yaitu mulai dari kira-kira -2,5 hingga 2,5.
Government Effectiveness (GE)	Variabel Dependen	Government Effectiveness mengukur persepsi tentang kualitas pelayanan publik, kualitas pelayanan sipil dan derajat kemandiriannya dari tekanan politik, kualitas perumusan dan implementasi kebijakan, dan kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Estimasi memberikan skor negara pada indikator agregat, dalam satuan distribusi normal standar, yaitu mulai dari kira-kira -2,5 hingga 2,5.

Sumber: Data Sekunder (2023)

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Uji Asumsi Dasar

a. Uji Normalitas

Untuk menguji apakah data yang digunakan berdistribusi normal, peneliti melakukan uji Shapiro-Wilk. Hasil uji menunjukkan nilai probabilitas ($Prob > Z$) sebesar 0,67647 dan 0,08696. Nilai probabilitas ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, yang berarti tidak terdapat bukti yang cukup kuat untuk menolak hipotesis nol bahwa data berdistribusi normal. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas yang merupakan salah satu syarat penting dalam analisis statistik parametrik seperti regresi linear dan ANOVA.

Keputusan untuk menggunakan teknik-teknik statistik parametrik ini didasarkan pada asumsi bahwa data berdistribusi normal, sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat dianggap lebih reliabel. Pemenuhan asumsi normalitas ini sangat penting karena akan mempengaruhi validitas hasil analisis statistik yang dilakukan. Jika data tidak berdistribusi normal, maka hasil analisis yang diperoleh mungkin tidak akurat dan dapat menyesatkan dalam penarikan kesimpulan."

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
CC	20	0.96634	0.797	-0.458	0.67647
GE	20	0.91705	1.963	1.360	0.08696

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Shapiro-Wilk

Sumber: Data diolah Stata 17 (2023)

b. Uji Homogenitas

Berdasarkan output, nilai F hitung sebesar 0,7206 pada degree of freedom (19,19). Nilai P Value ($2 * Pr(F < f)$) adalah 0,4818 lebih besar dari batas kritis 0,05 sehingga yang berarti tidak terdapat perbedaan variance yang bermakna antara kedua variabel dan disebut juga dengan homogen.

Variance ratio test

Variable	Obs	Mean	Std. err.	Std. dev.	[95% conf. interval]	
CC	20	-.6666887	.0546761	.244519	-.7811271	-.5522503
GE	20	-.1921333	.0644113	.2880563	-.3269478	-.0573188
Combined	40	-.429411	.056413	.356787	-.543517	-.315305

ratio = sd(CC) / sd(GE) f = 0.7206
H0: ratio = 1 Degrees of freedom = 19, 19

Ha: ratio < 1 Ha: ratio != 1 Ha: ratio > 1
Pr(F < f) = 0.2409 2*Pr(F < f) = 0.4818 Pr(F > f) = 0.7591

Gambar 3. Hasil Uji Homogenitas

Sumber: Data diolah Stata 17 (2023)

a. Regresi Linier Sederhana

Analisis Regresi Linier Sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel. Hasil pengolahan data regresi Linear dan ANOVA dapat dijelaskan pada gambar berikut:

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	20
Model	1.14266362	1	1.14266362	F(1, 18)	=	47.40
Residual	.433888462	18	.024104915	Prob > F	=	0.0000
Total	1.57655208	19	.082976425	R-squared	=	0.7248
				Adj R-squared	=	0.7095
				Root MSE	=	.15526

GE	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
CC	1.002928	.1456677	6.89	0.000	.6968914	1.308964
_cons	.4765074	.1031338	4.62	0.000	.2598314	.6931834

Gambar 4. Hasil Regresi Linear

Sumber: Data diolah Stata 17 (2023)

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Nilai Koefisien determinasi yang diperoleh adalah 0,71 atau 71% yang dapat ditafsirkan bahwa variabel bebas X

memiliki pengaruh kontribusi sebesar 71% terhadap variabel Y dan 29% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel X.

Prob>F adalah nilai uji F. Nilai uji F = 0.0000 artinya < dari 0.05 maka Ha diterima pada taraf signifikansi 5% yang berarti semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dikatakan signifikan pada taraf 5% apabila p-value < 0,05. artinya dari hasil output, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini berarti bahwa variabel pengendalian kejahatan korupsi berpengaruh terhadap SDGs di Indonesia.

Sehingga model persamaan regresi linier sederhananya adalah:

$$Y = 0,477 + 1,003CC+e$$

Nilai koefisien variabel dapat diartikan bahwa jika variabel pengendalian kejahatan korupsi meningkat sebesar 1 persen maka dapat meningkatkan pengaruh positif terhadap variabel SDGs sebesar 1,003 persen. Artinya, semakin efektif upaya dalam memberantas korupsi, semakin besar pula peluang untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian korupsi merupakan salah satu faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Penjelasan lebih lanjut:

- **Koefisien:** Angka yang menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Dalam konteks ini, koefisien 1,003 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pada variabel pengendalian korupsi akan diikuti oleh kenaikan 1,003% pada variabel SDGs.
- **Variabel pengendalian kejahatan korupsi:** Merujuk pada segala upaya yang dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, seperti penegakan hukum yang tegas, transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- **Variabel SDGs:** Merujuk pada keseluruhan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB, mencakup berbagai aspek seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan lingkungan hidup.

c. Koefisien Korelasi

Uji Korelasi menggunakan korelasi Pearson. Nilai korelasi dari hasil output adalah sebesar 1,000 dimana nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel pengendalian kejahatan korupsi dan SDGs di Indonesia.

	CC	GE
CC	1.0000	
GE	0.8513	1.0000

Gambar 5. Hasil Uji Korelasi Pearson

Sumber: Data diolah Stata 17 (2023)

Pembahasan

Pengendalian Kejahatan Korupsi dan Sustainable Development Goals

Hasil penelitian menjelaskan bahwa variabel pengendalian kejahatan korupsi berpengaruh terhadap SDGs di Indonesia dan terdapat korelasi positif yang kuat antara variabel tersebut. Memberantas korupsi merupakan prasyarat utama untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Bahkan dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan tidak akan berdampak pada kesejahteraan rakyat jika praktik korupsi masih besar. Korupsi merupakan hambatan utama bagi masyarakat untuk hidup lebih baik. Realitanya, orang di Indonesia saat ini masih belum kaya, namun dana pembangunan dihabiskan setiap tahunnya. Dugaan korupsi dalam good and bad governance dapat berarti bahwa penyediaan pelayanan publik dan pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan tidak sampai kepada mereka yang paling membutuhkan (Guritno dan Mangkunegara, 2022).

Korupsi dapat dimitigasi melalui penerapan mekanisme pencegahan seperti penerapan peraturan terkait tata Kelola yang baik yang mewujudkan budaya penghindaran ketidakpastian yang kuat (Mihret, 2014). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hope (2022) Korupsi dan penyuapan diketahui mempengaruhi semua sektor terkait SDGs, merusak hasil pembangunan dan secara serius membahayakan upaya untuk mencapai SDGs di Afrika. Oleh karena itu, memprioritaskan pengurangan korupsi, termasuk pencucian uang, penyuapan, dan aktivitas ilegal lainnya, akan membantu mencapai pembangunan berkelanjutan, tata kelola yang baik, dan institusi yang efektif dan inklusif sesuai dengan persyaratan SDGs 16. Ini merupakan prasyarat untuk membangun dan mendanai pencapaian tujuan SDGs tersebut.

Kesimpulan

Hasil penelitian menemukan bahwa variabel pengendalian kejahatan korupsi berpengaruh terhadap SDGs di Indonesia dan terdapat korelasi positif yang kuat antara variabel tersebut. Untuk mencapai salah satu tujuan SDGs 16, reformasi sistem politik Indonesia perlu dilakukan. Sistem politik harus mampu menjamin pemilihan pejabat publik yang jujur melalui proses pemilu yang jujur, adil dan tidak korupsi. Pejabat pemerintah yang lahir dari korupsi dan kolusi akan menghambat pencapaian SDGs secara keseluruhan. Pengalaman Indonesia dalam mengendalikan korupsi dapat memberikan pelajaran yang baik bagi negara lain dalam mengimplementasikan SDGs. Ini berlaku untuk semua tujuan, bukan hanya SDG 16. Hanya dengan mengendalikan korupsi birokrasi, legislatif, dan yudikatif, SDGs dapat meningkatkan kesejahteraan pada tahun 2030.

Referensi

- Assembly, G. (2015). Resolution adopted by the General Assembly on 11 September 2015. *New York: United Nations*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). *Komitmen Good Governance dan Kenaikan IPK Indonesia*. <https://www.bappenas.go.id>
- Fan, Z., Yan, Z., & Wen, S. (2023). Deep learning and artificial intelligence in sustainability: a review of SDGs, renewable energy, and environmental health. *Sustainability*, 15(18), 13493.
- Fleming, A., Wise, R. M., Hansen, H., & Sams, L. (2017). The sustainable development goals: A case study. *Marine Policy*, 86, 94-103.
- Guritno, Danur Condro dan Irfan Mangkunegara. (2022). Korupsi dan SDGs: Perspektif Ekonomi Kelembagaan. *Penerapan SDGs dalam Pembangunan Bangsa Prospek dan Kendala*
- Hope, Sr., K.R. (2022). Reducing Corruption and Bribery in Africa as a Target of The Sustainable Development Goals: Applying Indicators for Assessing Performance. *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 25 No. 2, pp. 313-329. <https://doi.org/10.1108/JMLC-03-2021-0018>
- Lasthuizen, Karin, Leo Huberts, dan Leonie Heres. (2011). How to Measure Integrity Violations: Towards a Validated Typology of Unethical Behavior. *Public Management Review* Vol. 13 - Issue 3: Management of Competing Public Values and Ethical Decisions. <https://doi.org/10.1080/14719037.2011.553267>
- Mihret, Dessalegn G. (2014). National Culture and Fraud Risk: Exploratory Evidence. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, Vol. 12, No.2, 161-176. <https://doi.org/10.1108/JFRA-10-2012-0049>

-
- Mugellini, Giulia dan Jean-Patrick Villeneuve. (2019). Monitoring the Risk of Corruption at International Level: The Case of the United Nations Sustainable Development Goals. *European Journal of Risk Regulation*, 10 (2019), pp. 201–207
- Peacock, Robert. (2021). Crime and Victimization in The Era of The United Nations Sustainable Development Goals. *E3S Web of Conferences 317*, 01001 (2021) ICENIS 2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131701001>
- Sunday, D. B. (2017). Gift, Bribery and Corruption in Nigeria: A Philosophical Re-Interpretation. *London Journal of Research in Humanities and Social Sciences*, 17(3).
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169-162.
- Transparency International. (2020). *Indonesia's Corruption Perceptions Index*. <https://www.transparency.org/>
- Mugellini, G., & Villeneuve, J. P. (2019). Monitoring the risk of corruption at international level: The case of the United Nations sustainable development goals. *European Journal of Risk Regulation*, 10(1), 201-207.
- World Population Review. (2022). *Indonesia Population Projections*. <https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population>